

ANALISIS KEMISKINAN NELAYAN DI KABUPATEN BANGKALAN

Eni Sri Rahayuningsih, SE.,ME
Jurusan Ekonomi Pembangunan - Fakultas Ekonomi - Universitas
Trunojoyo Madura

RINGKASAN

Selama tiga dasawarsa terakhir pembangunan kelautan dan perikanan selalu diposisikan sebagai sektor yang dipinggirkan (*peripheral sector*) dalam pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini sangat ironis, mengingat bahwa hampir 70% wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomis yang sangat tinggi. Perangkap kemiskinan yang melanda kehidupan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim-musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, dan modal. Tetapi juga disebabkan oleh lemahnya kelembagaan ekonomi nelayan. Kondisi tersebut merupakan penyebab ketergantungan nelayan pada rentenir yang merangkap sebagai tengkulak dan penyedia bahan bakar. Perjanjian nelayan dan tengkulak sangat merugikan nelayan, akibatnya daya tawar nelayan di pasar input dan output sangat lemah. Sehingga biaya produksi nelayan semakin meningkat sementara pendapatannya semakin menurun. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemiskinan nelayan secara komprehensif.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Selama tiga dasawarsa terakhir pembangunan kelautan dan perikanan selalu diposisikan sebagai sektor yang dipinggirkan (*peripheral sector*) dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini berarti bahwa bidang kelautan yang didefinisikan sebagai sektor

perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim dan jasa-jasa kelautan, bukan merupakan tujuan utama (*main stream*) kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini sangat ironis, mengingat bahwa hampir 70% wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomis yang sangat tinggi. Luas perairan laut Indonesia diperkirakan mencapai 5.8 juta km² yang terdiri atas 0.3 juta km² laut territorial, 2.8 juta km perairan Nusantara dan 2.7 juta km perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sehingga secara ekonomis sangat logis bila pada masa yang akan datang pembangunan nasional diarahkan pada bidang kelautan dan perikanan.

Berbagai pendekatan kebijakan pemerintah yang bersifat makro maupun mikro yang bertujuan untuk menekan dan memperkecil resiko dan dampak krisis ekonomi telah banyak dilakukan. Proses pemulihan perekonomian masyarakat ini menitikberatkan pada penanggulangan kemiskinan dengan program pemberdayaan. Pola pendekatan yang ditempuh berbasiskan pada fungsi penguatan kelembagaan ekonomi, pemberdayaan kemampuan masyarakat (SDM) serta memaksimalkan potensi lokal.

Tingkat sosial-ekonomi yang rendah merupakan ciri umum kehidupan nelayan dimanapun berada. Tingkat kehidupan mereka setaraf dengan petani kecil. Bahkan jika dibandingkan dengan secara seksama dengan kelompok masyarakat lain di sektor pertanian, nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan kecil atau nelayan tradisional) dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang miskin.

Perangkap kemiskinan yang melanda kehidupan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim-musim ikan,

keterbatasan sumber daya manusia, modal serta akses, jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak modernisasi kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut lainnya. Proses demikian masih terus berlangsung dan dampak lebih lanjut yang terasakan oleh nelayan adalah semakin menurunnya tingkat pendapatan mereka dan meningkatnya pengeluaran rumah tangganya.

1.2. Permasalahan

Secara umum permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan.

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan.

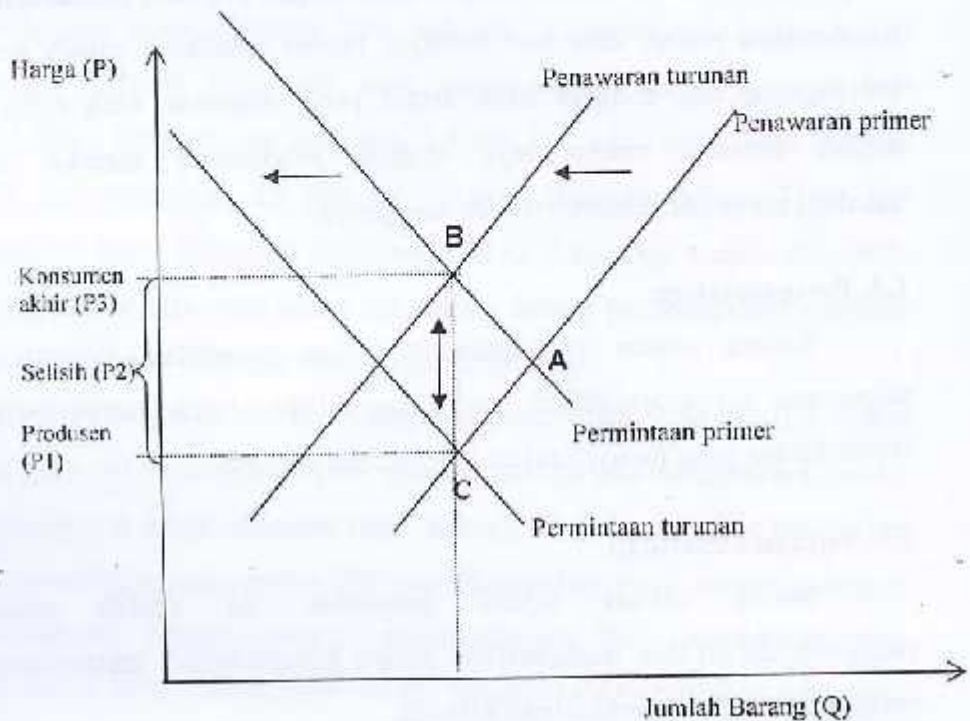
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Permintaan dan Penawaran

Teori harga yang paling sederhana mengasumsikan bahwa produsen dan konsumen akhir bertemu secara langsung, sehingga tidak ada perbedaan antara harga yang dibayar konsumen akhir dengan harga yang diterima produsen. Harga keseimbangan ditentukan oleh produsen dan konsumen akhir.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa produsen dan konsumen akhir tidak bertemu secara langsung, sehingga terjadi selisih

harga antara yang dibayar konsumen akhir dengan harga yang diterima produsen (Eni, 2000).



Gambar 1. Fungsi Penawaran dan Permintaan (Primer dan Turunan)

Sumbu vertikal menunjukkan tingkat harga (P), sumbu horizontal menunjukkan jumlah output (Q). Fungsi penawaran mempunyai slope positif dan sebaliknya fungsi permintaan mempunyai slope negatif. Fungsi penawaran mempunyai slope positif artinya, semakin tinggi harga jual maka jumlah barang yang dijual akan semakin banyak, atau sebaliknya. Fungsi permintaan mempunyai slope negatif artinya, semakin tinggi harga beli maka jumlah barang yang dibeli akan semakin sedikit, atau sebaliknya.

Semakin banyak jumlah barang yang dijual, maka peluang untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi juga akan semakin besar. Alasannya, semakin banyak jumlah barang yang dijual, selain semakin kuat posisi tawar dalam penentuan harga, juga akan menekan biaya pemasaran per unit. Semakin efisien biaya pemasaran, maka semakin besar peluang penjual untuk mendekati konsumen akhir. Sementara itu, semakin banyak jumlah barang yang dibeli, maka peluang untuk mendapatkan harga beli yang lebih rendah juga akan semakin besar. Alasannya, semakin banyak jumlah barang yang dibeli, selain semakin kuat posisi tawar dalam penentuan harga, juga akan menekan biaya pembelian per unit. Semakin efisien biaya pembelian, maka semakin besar peluang pembeli untuk mendekati produsen (Buse dan Brandow, 1960).

Dalam tulisannya Tomek menyebut produsen sebagai pelaku penawaran primer (*primary supply*), konsumen akhir sebagai pelaku permintaan primer (*primary demand*), dan pedagang perantara sebagai pelaku permintaan dan penawaran turunan (*derived supply and demand*). Produsen disebut sebagai pelaku penawaran primer karena, produsen menjual produk yang diproduksinya sendiri. Konsumen akhir disebut sebagai permintaan primer karena, konsumen akhir membeli produk dengan tujuan untuk digunakan sendiri atau tidak untuk dijual. Sedangkan pedagang perantara disebut sebagai permintaan dan penawaran turunan karena, pedagang perantara membeli produk dengan tujuan untuk dijual lagi guna mendapatkan laba.

Jika produsen (penawaran primer) bertemu secara langsung dengan konsumen akhir (permintaan primer) maka harga yang terbentuk berada di titik A. Munculnya pedagang perantara diantara

produsen dan konsumen akhir menyebabkan adanya selisih harga antara harga yang dibayar konsumen akhir dengan harga yang diterima produsen. Karena harga jual produsen menjadi lebih rendah (Titik C) dan atau harga beli konsumen akhir menjadi lebih tinggi (Titik B).

Menurut konsep pemasaran yang ditulis oleh Soekartawi, pemasaran yang efisien ialah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) biaya pemasaran yang memenuhi ukuran efisiensi fasilitas pemasaran; (2) selisih pemasaran (*marketing margin*) yang tidak terlalu tinggi. Sehingga harga produk dapat dijangkau oleh konsumen akhir sekaligus tidak merugikan produsen; (3) adanya kekuatan pasar yang seimbang, sehingga penentuan harga tidak merugikan salah satu pihak.

2.2. Teknik S-C-P

Salah satu teknik untuk meningkatkan efisiensi pemasaran dan sekaligus juga memperhatikan *welfare society* adalah dengan teknik S-C-P, yaitu; *market structure*, *market conduct*, dan *market performance*.

1. Struktur Pasar (*Market Structure*), meliputi: (1) Ukuran (besar-kecilnya) dan jumlah penjual dan jumlah pembeli; (2) Sistem keluar-masuknya barang diantara pelaku pemasaran; dan (3) Ciri-ciri khusus produk yang diperdagangkan.
2. Pelaksanaan Pasar (*Market Conduct*), meliputi : (1) *Proses pembentukan harga*; (2) Bagaimana efisiensi biaya pemasaran dapat dilakukan.
3. Penampilan Pasar (*Market Performance*), meliputi: pertumbuhan pasar, efisiensi penggunaan sumberdaya, dan penghematan pembiayaan.

Untuk meningkatkan harga jual produsen dalam kegiatan pemasaran, maka produsen harus meningkatkan efisiensi kegiatan

pemasaran dengan cara, antara lain: (1) mengurangi pedagang perantara pada saluran vertikal; (2) menggunakan metode penjualan secara kolektif, yaitu dengan melakukan integrasi horizontal; (3) memberi pinjaman dana kepada produsen untuk membiayai kegiatan pemasarannya.

Integrasi horizontal adalah penggabungan dua atau lebih dari dua pelaku pemasaran yang melaksanakan kegiatan/fungsi yang sama, dan pada tingkat distribusi yang sama pula. Contohnya, nelayan melakukan kerjasama dengan sesama nelayan untuk melakukan kegiatan pemasaran secara kolektif guna mencapai jumlah output tertentu yang memenuhi ukuran efisiensi fasilitas pemasaran (skala ekonomis). Integrasi horizontal banyak dilakukan oleh pelaku pemasaran dengan tujuan selain untuk menekan biaya pemasaran per unit juga untuk memperkuat posisi tawar dalam penentuan harga.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah aspek-aspek kemiskinan nelayan di Kabupaten Bangkalan., meliputi : aspek ekonomi dan non ekonomi.

Pendekatan dalam penelitian menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan komponen *stake holders* instansi terkait dan masyarakat nelayan di lokasi penelitian.

Lokasi penelitian di Desa Banyusangka Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan. Beberapa alasan yang mendasari pemilihan lokasi penelitian, antara lain:

1. Diantara 14 kecamatan penghasil ikan di Kabupaten Bangkalan, yang mempunyai kontribusi terbesar adalah Kecamatan Tanjungbumi dengan sentra penghasil ikan terbesar di Desa Banyusangka.
2. Masyarakat nelayan di Desa Banyusangka mempunyai produktifitas yang tinggi dengan sarana prasarana yang lengkap (koperasi nelayan, TPI, SPDN, kapal besar dan kecil, pasar, jalan raya, alat transportasi).
3. Di Desa Banyusangka Kecamatan Tanjungbumi terdapat koperasi nelayan (Koperasi nelayan Ikan Paus) yang sejak tahun 2005 terpilih sebagai salah satu koperasi pelaksana Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kabupaten Bangkalan

3.2. Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh nelayan di Desa Banyusangka Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan. Desa Banyusangka terdiri dari 4 (empat) dusun, yaitu: Dusun Barat Sungai, Dusun Timur Sungai, Dusun Tengah, dan Dusun Karang Laok.

Jumlah nelayan di Desa Banyusangka sebanyak 833 orang, meliputi: nelayan juragan dan pekerja. Sebagian Istri/keluarga perempuan nelayan pada umumnya bekerja sebagai bakul ikan. Oleh karena itu, pemilihan responden bakul ikan adalah orang yang suaminya atau anggota keluarganya (nelayan) belum terpilih sebagai

responden. Hal tersebut untuk menghindari jawaban yang sama.

Berdasarkan informasi tersebut, maka terdapat tiga tipe responden, yaitu: nelayan juragan, nelayan pekerja, dan bakul ikan, yang tersebar di 4 (empat) dusun, yaitu: Dusun Barat Sungai, Dusun Timur Sungai, Dusun Tengah, dan Dusun Karang Laok.

Jumlah responden yang disurvei sebanyak 120 responden (100%), meliputi : 40 responden (33,3%) juragan nelayan, 40 responden (33,3%) nelayan pekerja, dan 40 responden (33,3%) bakul ikan. Masing-masing tipe tersebut tersebar di 4 (empat) dusun Desa Banyusangka.

Sampel responden dipilih secara *purposive random sampling*, dengan teknik *snowball*. Dengan demikian, informasi setiap responden diperoleh dari responden sebelumnya.

3.3. Teknik dan Instrumen dalam Pengumpulan Data

Jenis data meliputi data primer dan data sekunder tentang kondisi perikanan dan nelayan di Kabupaten Bangkalan. Data primer diperoleh melalui survey terhadap stakeholder nelayan dan masyarakat nelayan di lokasi penelitian.

Data sekunder diperoleh melalui pengumpulan dokumen dari instansi terkait dan stakeholder nelayan di lokasi penelitian. Data dan informasi dilengkapi dengan dokumen berupa foto dan video tentang kondisi masyarakat nelayan di lokasi penelitian.

Teknik pengumpulan data, yakni : observasi, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Instrumen dalam penelitian adalah kuisioner dan pedoman wawancara.

3.4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis, yakni analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dengan teknik olah data *crosstabulation*. Dengan teknik tersebut diharapkan dapat diperoleh informasi yang komprehensif tentang penyebab kemiskinan nelayan.

IV. PEMBAHASAN

4.1. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Bangkalan dengan luas wilayah 1.260,14 Km² yang berada di bagian paling Barat dari pulau Madura terletak diantara koordinat 112°40'06" - 113°08'04" Bujur Timur serta 6°51'39" - 7°11'39" Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Disebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Disebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sampang
- Disebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Selat Madura.

Wilayah Kabupaten Bangkalan terdiri dari 18 kecamatan dan 281 desa/kelurahan atau lebih spesifik terdiri 273 desa dan 8 kelurahan. Dilihat dari komposisi jumlah desa, maka Kecamatan Tanah Merah memiliki jumlah desa terbanyak yakni 23 desa/kelurahan, sedangkan yang paling sedikit Kecamatan Kamal sebanyak 10 desa/kelurahan.

Di antara 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan, terdapat 11 kecamatan yang merupakan daerah pesisir, yaitu: Kecamatan Sepulu, Bangkalan, Socah, Kamal, Modung, Kwanyar, Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, Labang dan Burneh.

Total nilai PDRB Kabupaten Bangkalan tahun 2006 dihitung atas dasar harga konstan 2000 sebesar 2,821,29 milyar. Jika dilihat dari nilai produksinya, tahun 2006 sumbangan nilai terbesar dari nelayan perikanan laut yakni diatas Rp. 70 milyar. Urutan kedua dari nelayan perairan tambak dengan sumbangannya sebesar Rp. 108 juta. Sumbangan nilai produksi terkecil dari nelayan kolam dengan nilai sebesar Rp. 20 juta. Diantara 14 kecamatan penghasil ikan, yang mempunyai kontribusi terbesar adalah Kecamatan Tanjungbumi dengan sentra penghasil ikan terbesar di Desa Banyusangka.

Jumlah nelayan di perairan laut pada saat ini telah mencapai 5253 orang dengan daerah penangkapan di daerah Selat Madura sejauh 0-4 mil laut dari lepas pantai, dengan kepadatan nelayan mencapai 3.17 orang/ km². Produksi perikanan laut di kabupaten bangkalan, antara lain: Layang, Tongkol, Tembang, Tenggiri, Kembung dan Cumi. Jumlah RTP (Rumah Tangga Perikanan) dan Usaha Perikanan Laut berjumlah 2367 RTP dengan komoditas olahan yang sederhana seperti : ikan asin, ikan asap, petis dan terasi. Jenis perahu yang digunakan sebagian besar adalah perahu motor tempel atau tanpa motor dengan bobot 3-5 GT, dengan alat tangkap berupa jaring hanyut dan pancing. Sebagian besar armada perikanan tangkap yang digunakan oleh nelayan Bangkalan adalah perahu dengan motor tempel. Sedangkan alat penangkap ikan yang sering dipakai adalah pancing tonda dan jaring insang hanyut.

4.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN NELAYAN

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (Nelayan) Masih Rendah

Ketrampilan nelayan diperoleh secara turun-temurun. Nelayan cenderung bersikap apatis dan tidak ada keinginan untuk meningkatkan ketrampilannya. Hal ini menyebabkan tidak ada peningkatan produksi yang signifikan. Nelayan tradisional di Kabupaten Bangkalan belum bisa melihat adanya insentif (keuntungan) dari peningkatan ketrampilan. Sehingga sebagian besar nelayan berpendidikan rendah.

Jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikannya, meliputi: (1) 30,0% Tidak sekolah; (2) 62,5% SD; (3) 6,7% SLTP; dan (4) 0,8% SLTA. Jumlah responden yang tidak sekolah meliputi: (1) 19,2% Bakul ikan ; (2) 3,3% nelayan pekerja; dan (3) 7,5% juragan nelayan. Jumlah responden yang berpendidikan SD meliputi: (1) 12,5% Bakul ikan ; (2) 25,0% nelayan pekerja; dan (3) 25,0% juragan nelayan. Jumlah responden yang berpendidikan SLTP, meliputi: (1) 1,7% Bakul ikan; (2) 4,2% nelayan pekerja; dan (3) 0,8% juragan nelayan. Jumlah responden yang berpendidikan SLTA hanya 0,8% pekerja nelayan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa para nelayan dan bakul ikan mempunyai kecenderungan berpendidikan rendah karena kurang mempunyai kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. Bahkan masih banyak nelayan yang tidak berpendidikan sama sekali.

Semua responden menyatakan bahwa pekerjaannya sebagai bakul ikan, nelayan pekerja, dan juragan nelayan merupakan pekerjaan utamanya. Sebagian besar responden (89,2%) menyatakan tidak mempunyai pekerjaan sampingan. Sementara itu hanya 10,8% responden menyatakan mempunyai pekerjaan sampingan. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan di lokasi penelitian sangat tergantung pada pekerjaannya sebagai nelayan dan tidak mempunyai alternatif pekerjaan lainnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga nelayan terutama pada saat tidak musim ikan (musim paceklik).

Pada saat paceklik para nelayan sangat memerlukan pinjaman dana untuk biaya melaut dan kebutuhan hidup sehari-hari. Hal inilah yang selama ini menjadi penyebab utama terjeratnya para nelayan pada para rentenir yang merangkap sebagai tengkulak dan penyedia bahan bakar. Ikatan perjanjian antara nelayan dan rentenir tersebut pada umumnya merugikan nelayan dan berakibat pada lemahnya posisi tawar nelayan di pasar input dan output. Sementara itu manajemen keuangan rumah tangga nelayan sangat kurang terkontrol dan cenderung konsumtif. Sehingga pada saat musim ikan, pendapatannya tidak digunakan untuk membayar hutang atau berinvestasi melainkan untuk berfoya-foya. Semua kondisi tersebut merupakan penyebab kemiskinan nelayan.

2. Kredibilitas Nelayan untuk Menjangkau Kredit di Lembaga Keuangan Formal (Bank) Rendah

Keberadaan bank untuk melayani masyarakat nelayan masih tergolong baru. Jenis pelayanan yang diberikan ada dua jenis, yaitu tabungan dan kredit. Pemberian kredit ditujukan untuk pengembangan usaha baik untuk perdagangan, jasa maupun produksi.

Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank untuk masyarakat perikanan adalah Kredit Kelompok Usaha Kecil, yang bertujuan untuk mengembangkan usaha dan bukan untuk membuka usaha baru.

Fasilitas ini diberikan pada kelompok pengolah ikan, pedagang ikan maupun untuk nelayan tradisional modern (nelayan *purse seine*). Walaupun ada fasilitas kredit yang ditujukan untuk masyarakat perikanan namun menurut keterangan pegawai Bank, hingga saat ini dari kalangan masyarakat perikanan yang lebih banyak memanfaatkan jasa kredit dari bank adalah kelompok pedagang (tengkulak) dan pengolah ikan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: jaminan yang tidak dapat dipenuhi oleh nelayan, ketidakpastian pendapatan, prosedur peminjaman yang dianggap sulit oleh nelayan yang tidak terbiasa dengan aturan formal, bunga dan rutinitas angsuran yang dianggap memberatkan nelayan. Dengan alasan tersebut, sangat sedikit jumlah nelayan yang berani mengajukan kredit pada perbankan (Dinas Perikanan dan Kelautan Bangkalan, 2007)

3. Keterbatasan Pemanfaatan Sumberdaya Laut

Sumberdaya laut di Kabupaten Bangkalan secara potensial bisa dikatakan luas. Tetapi pada saat ini telah mengalami fenomena *over fishing* (tangkap lebih) yang menjadikan hasil laut yang didapat oleh para nelayan semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh makin bertambahnya jumlah/kepadatan nelayan namun tidak diimbangi oleh pencarian *fishing ground* baru yang lebih luas. Daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) nelayan di Kabupaten Bangkalan hanya terbatas di sekitar Laut Jawa dan Selat Madura.

4. Teknologi Penangkapan yang Masih Sederhana

Teknologi penangkapan ikan yang dipakai oleh nelayan Kabupaten Bangkalan sebagian besar masih bersifat tradisional. Hal ini

dapat dilihat dari jenis perahu dan jenis alat tangkap yang digunakan. Perahu yang dipakai oleh nelayan Bangkalan untuk melaut umumnya berskala kecil dengan tonase tidak lebih dari 5-10 GT (bobot mati). Sedangkan alat tangkapnya terdiri dari pancing dan jaring insang. Kondisi ini membuat para nelayan tidak dapat melakukan penangkapan ikan di laut lepas bahkan sampai zone ZEE. Kecuali untuk nelayan Tanjung Bumi yang telah memiliki perlengkapan kapal yang cukup memadai.

5. Teknologi Pengolahan Ikan (Pasca Panen) yang Tradisional

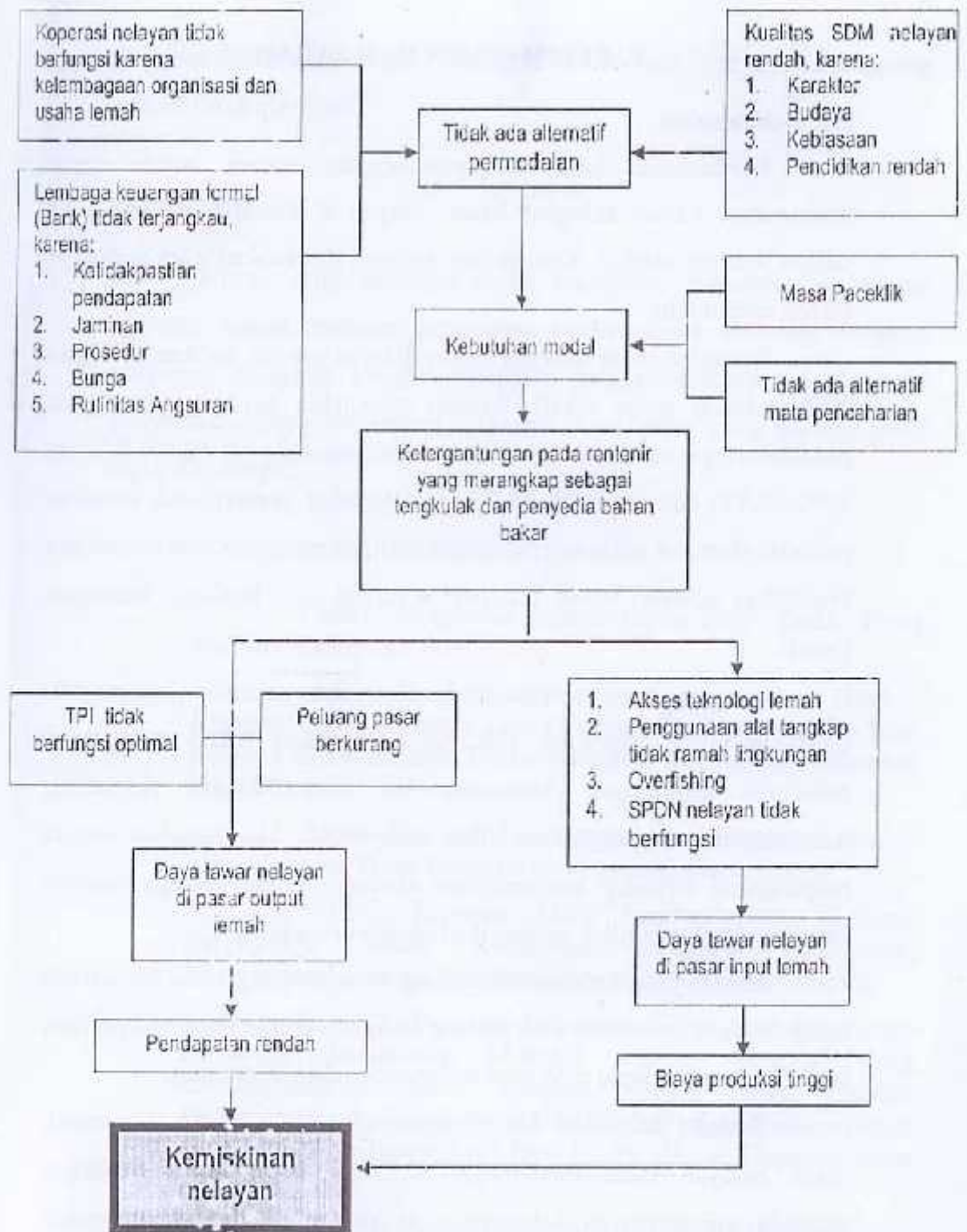
Industri pengolahan ikan di Kabupaten Bangkalan masih terbatas produksinya untuk produk-produk sederhana, seperti: ikan asin, ikan kering, petis dan terasi. Belum adanya investasi dalam bidang pengolahan ikan secara modern seperti industri pengalengan ikan, ikan beku atau industri kerupuk dan tepung ikan, membuat nelayan cenderung menjual ikan segar atau hasil olahan sederhananya saja. Hal ini jelas berdampak pada penghasilan nelayan, karena produk-produk tradisional tersebut hanya memiliki nilai ekonomis yang rendah.

6. Kelembagaan Ekonomi Nelayan (koperasi) Lemah

Kelembagaan ekonomi nelayan (koperasi) seharusnya menjadi lembaga yang mampu mengorganisir atau mengelola potensi ekonomi nelayan agar semua kebutuhan nelayan dapat terpenuhi secara lebih baik dan kesejahteraan rumah tangga nelayan menjadi meningkat. Namun sayangnya lembaga ekonomi nelayan (koperasi nelayan) belum ada yang berfungsi dengan baik.

Pendataan Koperasi nelayan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan pada tahun 2005 dengan sumber data dari Kantor Koperasi Kabupaten Bangkalan. Dari hasil pendataan 21 Koperasi Perikanan yang berbadan hukum, hanya 4 (empat) koperasi yang melaksanakan RAT, yaitu: (1) Koperasi Ikan Paus; (2) Koperasi Tunas Mekar; (3) Koperasi Mutiara Laut; dan (4) Koperasi Dunia Usaha Mandiri. Hingga saat ini keempat koperasi tersebut juga belum mampu melaksanakan fungsinya dengan baik.

Dengan lemahnya kelembagaan ekonomi nelayan (koperasi), maka nelayan tidak mempunyai alternatif permodalan. Sehingga semakin memperparah ketergantungan nelayan pada rentenir. Ketergantungan pada rentenir tersebut menyebabkan lemahnya posisi tawar nelayan di pasar input dan output. Di pasar output, ketergantungan pada rentenir menyebabkan pendapatan nelayan rendah karena TPI tidak berfungsi optimal dan pengolahan ikan sangat sederhana. Di pasar input, ketergantungan pada rentenir menyebabkan biaya produksi nelayan tinggi karena akses teknologi lemah, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, overfishing, dan SPDN nelayan tidak berfungsi.



Gambar 1.
Skema Kemiskinan Nelayan

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nelayan di Kabupaten Bangkalan adalah nelayan miskin. Kemiskinan nelayan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

Sebagian besar nelayan berpendidikan rendah, bahkan sebagian tidak sekolah sama sekali. Jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikannya, meliputi: (1) 30,0% Tidak sekolah; (2) 62,5% SD; (3) 6,7% SLTP; dan (4) 0,8% SLTA. Hal tersebut berpengaruh terhadap perilaku ekonomi nelayan yang negatif hingga menyebabkan rendahnya kredibilitas nelayan untuk mengakses modal dari lembaga keuangan formal.

Sebagian besar nelayan tidak mempunyai pekerjaan sampingan. Sebagian besar responden (89,2%) menyatakan tidak mempunyai pekerjaan sampingan. Sementara itu hanya 10,8% responden menyatakan mempunyai pekerjaan sampingan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga nelayan terutama pada saat tidak musim ikan (musim paceklik).

Modal yang terbatas dan jumlah nelayan yang terus bertambah menyebabkan fenomena *over fishing* (tangkap lebih) yang menjadikan hasil laut yang didapat oleh para nelayan semakin berkurang.

Dengan lemahnya kelembagaan ekonomi nelayan (koperasi), maka nelayan tidak mempunyai alternatif permodalan. Sehingga semakin memperparah ketergantungan nelayan pada rentenir yang merangkap sebagai tengkulak dan penyedia bahan bakar. Ketergantungan tersebut menyebabkan lemahnya posisi tawar nelayan

di pasar input dan output. Sehingga kemiskinan nelayan berlangsung secara terus menerus.

1.2. Saran

Solusi yang strategis untuk mengatasi masalah kemiskinan nelayan adalah melalui penguatan kelembagaan ekonomi nelayan (koperasi nelayan). Dengan demikian nelayan mempunyai alternatif petnodalan yang terjangkau sekaligus daya tawar yang kuat di pasar input dan output.

DAFTAR PUSTAKA

-, 2007. *Bangkalan Dalam Angka 2007*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan.
-, 2005. *Pengembangan Pembiayaan Non Bank : Koperasi simpan Pinjam Dan Lembaga Keuangan Mikro Bagi Nelayan di Jawa timur*. Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.
-, 2000. *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Tani-Nelayan*. Pusat Penyuluhan Pertanian, Departemen
-, 2005. *Laporan Akhir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Bangkalan*. Konsultan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat Madura Mandiri.
- Bayu Krisnamurthi, 2007. *Koperasi Indonesia: Tidak Akan Ada Tanpa Semangat Kerjasama*. Makalah seminar nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dosen dan Peneliti Perkoperasian Indonesia (ADOPKOP), berjudul : Perkoperasian Indonesia yang Berjatidiri : Refleksi Pemikiran Koperasi masa Depan, Malang.
- Buchari Alma, 2005. *Manajemen Kredit Mikro*. Alfabeta Bandung.
- Cornelis, et al, 2005. *Kelembagaan Dan Ekonomi Rakyat*. BPFE, Yogyakarta.

- Eni Sri Rahayuningsih, 2000. *Analisis Peningkatan Harga Jual Padi di Tingkat Petani Produsen*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Koutsoyiannis, 1975. *Modern Microeconomics*. The Macmillan Press, Ltd, London.
- Morozumi Kazuo, et al, 1999. *Some Issues On The Characteristics Of Rural Cooperatives In Indonesia*. Nation Research Institute Of Agriculture Economic Ministry Of Agriculture, Forestry And Fisheries.
- Rokhmah Dahuri, 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta.
- Ramudi Ariffin, 2002. *Manfaat Harga Koperasi. Landasan Teoritis Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*. Penerbit: Laboratorium Manajemen Koperasi IKOPIN, Bandung.
- Sahri Muhammad, 2005. *Sistem Pembiayaan Bagi Hasil : Solusi Pemadalan Jangka Panjang yang Sesuai Dengan Karakteristik Usaha Perikanan*. Universitas Brawijaya, Malang.
- William G.Tomek and Kenneth L.Robinson, 1990. *Agricultural Product Prices*. Cornell University Press, Ithaca and London.
- Zainul Hidayah, 2005. *Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Hayati Laut Madura*. Universitas Trunojoyo, Madura.